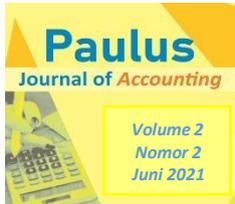


**ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PUSAT
STATISTIK (BPS) KABUPATEN TANA TORAJA**

Dwibin Kannapadang¹

Universitas Kristen Indonesia Toraja
dwibinkannapadang90@gmail.com



e-ISSN 2715-7474

p-ISSN 2715-9892

Informasi Artikel

Tanggal masuk

08 April 2021

Tanggal revisi

11 Juni 2021

Tanggal diterima

28 Juni 2021

Kata Kunci:

Anggaran¹

Kinerja²

Belanja³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja anggaran belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018-2020. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yang diolah dengan menggunakan alat analisis kinerja belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) analisis varians belanja pada realisasi belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja menunjukkan kinerja anggaran yang baik dimana realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang ditargetkan sebelumnya; (2) analisis pertumbuhan belanja menunjukkan adanya pertumbuhan belanja, dari tahun 2018-2020 terjadi pertumbuhan positif rata-rata sebesar 6,39%; (3) analisis keserasian belanja menunjukkan harmonisasi belanja tidak seimbang dimana BPS Kabupaten Tana Toraja hanya terfokus kepada belanja operasi dibandingkan belanja modal; (4) BPS Kabupaten Tana Toraja sudah melakukan efisiensi belanja dengan menggunakan anggaran yang tidak melebihi realisasinya. Namun terdapat dua program di tahun 2018 yang tidak berjalan secara efisien. Akan tetapi, secara keseluruhan kinerja anggaran belanja BPS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018-2020 dapat dikatakan baik.

Abstract: This study aims to analyze the budget performance of the Central Statistics Agency for Tana Toraja Regency in 2018-2020. The method used is a quantitative descriptive method which is processed using a shopping performance analysis tool. The results showed that (1) the analysis of the expenditure variance on the expenditure realization of the Central Statistics Agency of Tana Toraja Regency showed good budget performance where the realization of expenditure did not exceed the previously targeted budget; (2) spending growth analysis shows spending growth, from 2018-2020 there was an average positive growth of 6.39%; (3) the compatibility analysis of expenditures shows that the harmonization of expenditures is not balanced where BPS of Tana Toraja Regency only focuses on operating expenditures rather than capital expenditures; (4) BPS Tana Toraja Regency has made expenditure sufficiency by using a budget that does not exceed its realization. However, there were two programs in 2018 that did not run efficiently. However, the overall performance of the Tana Toraja Regency BPS budget for 2018-2020 can be said to be good.



PENDAHULUAN

Perkembangan reformasi sektor publik yang begitu dinamis saat ini tidak dapat dilepaskan dari tuntutan masyarakat yang melihat secara kritis buruknya kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Perubahan berbagai aspek yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah ditunjang oleh kualitas pengelolaan kas pemerintah, salah satunya dengan proses perencanaan kas secara nasional proporsionalitas proses pelaksanaan anggaran dengan rencana penarikan dana bagi setiap satker.

Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN.

Instansi pemerintah yang merupakan pemegang kuasa pengelolaan dan penggunaan anggaran yang berpatokan pada tujuan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dari suatu instansi, maka dari itu dalam pemerintah mengelola dana anggaran semuanya itu tidak luput dari kinerja anggaran yang merupakan penilaian dan atau pengukuran terhadap pelaksanaan atau perealisasi dari anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh kementerian negara/lembaga antara lain, laporan realisasi anggaran yang merupakan salah satu laporan keuangan yang di publikasikan untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penilaian kinerja keuangan. Laporan realisasi anggaran ini merupakan jenis laporan keuangan yang dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Dalam laporan realisasi anggaran memuat tentang semua aktivitas perealisasi angsaran. Dan dapat dilihat bahwa anggaran yang merupakan tulang punggung (*backbone*) penyelenggaraan semua aktivitas pemerintahan, dan yang memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan yang utama. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tersebut, pembaca laporan dapat membuat Analisis Kinerja Laporan Keuangan berupa Analisis Pendapatan, Analisis Belanja, dan Analisis Pembiayaan.

Analisis pada belanja sangatlah penting untuk dilakukan karena belanja merupakan aktivitas rutin yang dilaksnakan oleh pemerintah, dan belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*publik fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Karena mengingat sifat belanja yang relative mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan.

Objek penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tana Toraja. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu tugas dari Badan Pusat Statistik adalah untuk melakukan sensus ke setiap daerah yang menjadi wilayah kerjanya termasuk daerah perbatasan. Hal itu, pasti menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Sebagai lembaga pemerintah yang mendapatkan kucuran dana dari keuangan negara, BPS Kabupaten Tana Toraja belum pernah melakukan analisis kinerja anggaran belanja yang menjadi dasar evaluasi dari penganggaran, oleh karena itu sudah seharusnya BPS melakukan analisis kinerja anggaran belanja untuk dapat meningkatkan kualitas

kinerja anggaran yang baik, efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Analisis tersebut didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2018-2020.

KAJIAN LITERATUR

Anggaran

Anggaran menurut Halim dan Kusufi (2016:48) adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya (Rahayu & Rachman, 2013:4). Sedangkan Menurut Sasongko dan Parulian (2015:2) mengatakan anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dari pengertian anggaran di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam satuan uang pada periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan.

Anggaran dalam instansi pemerintah merupakan tulang punggung penyelenggaraan semua aktivitas pemerintah. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya public, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu Laporan Realisasi Anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tersebut pengguna laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2010 (2011:18), Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang di gunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Jumlah belanja yang dianggarkan dikreditkan terhadap akun yang sesuai kemudian apabila belanja tersebut direalisasikan, maka akun tersebut didebit kembali. Saldo yang ada dengan demikian menunjukkan jumlah anggaran yang belum dibelanjakan. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematis dan kontinu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas.

Belanja

Berdasarkan Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006, belanja menurut kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tercantum dalam Undang-undang Republik nomor 10 tahun 2010 pasal 1 nomor 8-9 bahwa “Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga (K/L), sesuai dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah yang akan dijalankan”.

Sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 7 belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang akan mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran tersebut yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah .

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayaran kembali oleh pemerintah. SAP 2010 (2011:331) menyatakan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Halim (2016: 102) memberikan definisi belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut basis akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang di akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, klasifikasi belanja yang digunakan menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yaitu: 1) Belanja Negara; 2) Belanja Pegawai; 3) Belanja Barang; 4) Belanja Modal; 5) Pembayaran Bunga Utang; 6) Subsidi; 7) Hibah; 8) Bantuan Sosial; dan 9) Belanja Lain-lain

Kinerja

Menurut Mahsun (2012: 25), kinerja (*performa*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi.

Menurut Mangkunegara (2016:67) istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *Actual Performanse* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya

Sedangkan Menurut Edison (2016:190), definisi kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat kita definisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu organisasi yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari organisasi dimana individu bekerja.

Kinerja Anggaran Belanja

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang telah di tetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau strategi, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Menurut Mahmudi (2016: 154), Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk menilai atau mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja keuangan belanja dapat dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah daripada anggaran belanja. Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa: 1) analisis varians belanja, merupakan analisis terhadap perbedaan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja; 2) analisis pertumbuhan belanja, dimana analisis ini merupakan kenaikan atau penurunan belanja selama kurun waktu tertentu; 3) analisis keserasian belanja, dimana analisis ini bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja; 4) analisis efisiensi belanja, yang merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja;

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angka-angka dan pengolahan statistik. Satuan analisis dalam penelitian ini yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Tana Toraja dan satuan pengamatannya adalah laporan realisasi anggaran BPS kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2018 – 2020.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pegawai maupun pimpinan pada objek penelitian; dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen maupun literature-literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan pada BPS kabupaten Tana Toraja.

Adapun teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis kinerja belanja (Mahmudi 2016: 155) antara lain 1) analisis varian belanja (selisih belanja); 2) analisis pertumbuhan belanja; 3) analisis keserasian belanja; dan 4) rasio efisiensi belanja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Varians Belanja

Tabel 1
Analisis Varians Belanja BPS Kabupaten Tana Toraja
Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians	Persentase(%)	Realisasi(%)
1	2	3	4 = 3-2	5 = 4/2	6 = 3/2
2018	4.361.136.000	4.214.191.929	146.944.071	3,37%	96,63%
2019	4.868.374.000	4.813.860.648	54.513.352	1,12%	98,88%
2020	5.488.276.000	5.052.019.205	436.256.795	7,95%	92,05%
Total	14.717.786.000	14.080.071.782	637.714.218	4,33%	95,67%

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja (Data Diolah,2021)

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa analisis varians belanja BPS Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2018-2020 selalu lebih kecil dari target anggaran yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tahun anggaran 2018 ada sisa anggaran belanja sebesar Rp. 146.944.071,- atau sebanyak 3,37% yang sudah tidak teralisasi. Pada Tahun 2019 ada sisa anggaran sebesar Rp. 54.513.352,-

atau sebanyak 1,12% yang sudah tidak terealisasi dan pada tahun 2020 ada sisa anggaran sebesar Rp.436.256.795,- atau sebanyak 7,95% yang sudah tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena sistem penggunaan anggaran berbasis kinerja yang digunakan sesuai dengan kebutuhan atau kinerja dari BPS Kabupaten Tana Toraja.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan belanja yang signifikan. Total Pertumbuhan realisasi belanja pada tahun 2019 adalah sebanyak Rp.599.668.719,- atau sebesar 14,23% dari total realisasi belanja tahun 2018. Yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan pada anggaran belanja tahun 2019 adalah terjadi kenaikan perealisasi anggaran belanja pada belanja gaji pegawai sebesar Rp.206.592.469,- atau sebanyak 6 % dan belanja barang sebesar Rp. 393.076.250,- atau sebanyak 50,88%.

Pertumbuhan belanja pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan belanja yang signifikan. Total Pertumbuhan realisasi belanja pada tahun 2020 adalah sebanyak Rp.238.158.557,- atau sebesar 4,95% dari total realisasi belanja tahun 2019. Yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan pada anggaran belanja tahun 2019 adalah terjadi kenaikan perealisasi anggaran belanja pada belanja barang sebesar Rp.583.882.823,- atau sebanyak 50,09% dan belanja modal sebesar Rp.41.229.493,- atau sebanyak 41229493%.

Berdasarkan analisis pertumbuhan belanja yang telah dilakukan tentang kinerja keuangan anggaran belanja pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan positif, dimana ditunjukkan pada table 2 di bawah ini.

Tabel 2
Rasio Pertumbuhan Belanja BPS Kabupaten Tana Toraja
Tahun Anggaran 2018 – 2020

No	Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Pertumbuhan Belanja (%)	Keterangan
1	2018	Rp. 4.214.191.929,-	-	-
2	2019	Rp. 4.813.860.648,-	14,23%	Positif
3	2020	Rp. 5.052.019.205,-	4,95%	Positif
	Rata-Rata	Rp. 4.693.357.260,-	6,39%	Positif

Sumber : Data Diolah 2021

Analisis Keceragaman Belanja

Analisis keceragaman belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Berdasarkan hasil analisis data dapat dijelaskan rasio Analisis Keceragaman Belanja pada BPS Kabupaten Tana Toraja dimana penggunaan anggaran belanja paling banyak dialokasikan kebelanja operasi. Hal ini dapat terlihat dari perbandingan rasio analisis keceragaman belanja dimana pada tahun 2018 dan tahun 2019 BPS mengalokasikan seluruh anggaran belanja pada belanja operasi sebesar 100% dan belanja modal 0%. Pada tahun 2020 rasio keceragaman belanja operasi sebesar 99,18% dan rasio keceragaman belanja modal sebesar 0,82%.

Rasio Efisiensi Belanja

Dari perhitungan rasio efisiensi Badan Pusat Statistik tahun 2018 diperoleh nilai sebesar 96,63% menunjukkan belanja BPS pada tahun 2018 efisien. Pada tahun 2019 diperoleh nilai sebesar 98,8% juga menunjukkan rasio efisiensi belanja. Sedangkan pada tahun 2020 diperoleh nilai sebesar 92,05% yang menunjukkan tingkat efisiensi. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rasio efisiensi belanja badan pusat statistik pada tahun ini dapat dikatakan lebih rendah dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Hal ini diakibatkan dari adanya penurunan pada belanja pegawai. Rasio Efisiensi Belanja Per Program Badan Pusat Statistik Tahun 2020 dapat dijelaskan bahwa BPS dalam menjalankan beberapa program kegiatannya dijalankan secara efisien, hal ini dapat dilihat dari rasio efisiensi belanja per program yang tidak lebih dari 100%.

Pembahasan Penelitian

Analisis Varians Belanja

Berdasarkan analisis varians belanja yang berfungsi untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran, dengan tidak melebihi anggaran pada periode tersebut. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 selisih penggunaan anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja adalah sekitar Rp 146.944.071, atau sekitar 96,63% dalam hal ini menyisakan 3,37% yang belum direalisasikan pada tahun tersebut. Pada tahun 2019 selisih penggunaan anggaran adalah Rp 54.513.352.- atau sekitar 98,88% dalam hal ini menyisakan 1,12% yang belum direalisasikan pada tahun tersebut dan pada tahun 2020 selisih penggunaan anggaran adalah Rp 436.256.795.- atau sekitar 92,05% dalam hal ini menyisakan 7,95% yang belum direalisasikan pada tahun tersebut. Hal ini menunjukkan kinerja anggaran belanja dilihat dari analisis varians belanja dapat dikatakan baik, dikarenakan realisasi belanja lebih kecil dari anggaran belanja yang sudah ditargetkan sebelumnya. Selain itu dapat dilihat juga dari persentase rata-rata realisasi belanja BPS Tahun 2018-2020 di atas 90% yaitu sebesar 95,67 % yang berarti ketercapaian/target yang sudah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Renstra (Rencana Strategis) sudah tercapai, karena mengingat sistem penggunaan anggaran pada Badan Pusat Statistik berbasis kinerja yang digunakan sesuai dengan kebutuhan atau kinerja dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tana Toraja. Yang berarti seluruh program kegiatan yang direncanakan sebelumnya terlaksana dengan baik dan dilakukan secara efisien dimana BPS telah melakukan penghematan penggunaan realisasi anggaran dengan baik karena tidak melebihi batas maksimum anggaran.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Mahmudi (2016:155) yaitu pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari jumlah yang dianggarkan. Dimana diketahui bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selama batas maksimum anggaran belanja ini tidak dilampaui oleh pemerintah daerah dalam hal ini BPS Kabupaten Tana Toraja maka dapat dinilai bahwa kinerja belanja yang sudah direalisasikan oleh BPS Kabupaten Tana Toraja dapat dinilai baik.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Berdasarkan analisis pertumbuhan belanja yang telah dilakukan terhadap data belanja tahun 2018-2020 pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tana Toraja menunjukkan pertumbuhan positif dimana terjadi pertumbuhan realisasi belanja pada tahun 2019 yaitu sebanyak Rp.599.668.719.- atau sebesar 14,23% dari total anggaran realisasi belanja tahun 2018. Yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan pada anggaran belanja tahun 2019 adalah terjadi kenaikan perealisasi anggaran belanja pada belanja

pegawai sebesar Rp.206.592.469.- atau sebanyak 6,00% dan belanja barang sebesar Rp.393.076.250.- atau sebanyak 50,88%. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan kenaikan belanja operasi terhadap total belanja, hal ini dapat dijelaskan pada perhitungan dimana terjadi pertumbuhan realisasi belanja operasi pada tahun 2020 sebanyak Rp.238.158.557.- atau sebesar 4,95% dari total anggaran belanja tahun 2019. Yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan belanja adalah pada belanja barang sebesar Rp. 583.882.823.- atau sebanyak 50,09% dan belanja modal sebesar Rp.41.229.493.- dimana tahun 2018 sampai tahun 2019 BPS tidak memprioritaskan belanja modal, baru di tahun 2020 BPS Kabupaten Tana Toraja menganggarkan belanja Modal. Rata-rata Pertumbuhan Belanja BPS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018-2020 adalah sebesar 6,39%. Kenaikan pertumbuhan belanja tahun 2018-2020 BPS Kabupaten Tana Toraja dapat dinilai wajar, hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan belanja pada belanja pegawai dimana terjadi kenaikan perealisasi pada belanja gaji dan tunjangan pegawai, dan juga dipengaruhi adanya inflasi yang tinggi pada tahun tersebut karena umumnya belanja dipengaruhi oleh penyesuaian inflasi, perubahan kurs rupiah dan factor makro lain sehingga cukup berpengaruh pada program kegiatan yang sedang berjalan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Mahmudi (2016:158) dimana dinyatakan bahwa belanja daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, dan perubahan cakupan pelayanan.

Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Berdasarkan analisis keserasian belanja yang telah dilakukan pada BPS Kabupaten Tana Toraja terlihat bahwa pada tahun 2018-2020 sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja operasi yaitu 99,73% dibandingkan belanja modal sebesar 0,27% sehingga rasio belanja modal relative lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa total belanja dari APBN lebih besar dialokasikan untuk belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Sehingga menyebabkan alokasi dana untuk belanja modal menunjukkan nilai yang terlalu rendah bahkan tidak mencapai batas minimum proporsi yang ditetapkan yaitu antara 5-20% anggaran yang dibelanjakan pada periode tersebut. Sehingga anggaran BPS Kabupaten Tana Toraja dalam rencana maupun realisasi belanja daerahnya lebih besar persentasenya pada belanja operasi sedangkan untuk pelayanan public seperti infrastruktur, Irigasi dan asset lainnya yang termasuk belanja modal masih rendah. Hal ini disebabkan karena system perencanaan penyusunan anggaran di BPS dilakukan secara *Top Down Planning* dimana penyusunan anggaran dilakukan oleh BPS RI tidak berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang terjadi di setiap daerah yang mengakibatkan tidak adanya belanja modal yang dialokasikan oleh BPS Kabupaten dalam perencanaan anggaran setiap tahunnya, sehingga pengalokasian anggarannya lebih banyak dialokasikan ke program prioritas lebih diutamakan dimasukkan kedalam anggaran belanja pegawai dan belanja operasi dibandingkan pemenuhan kebutuhan belanja modal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa BPS Kabupaten Tana Toraja dalam analisis keserasian belanjanya menunjukkan kinerja yang kurang baik karena dana belanja operasi melebihi proporsi belanja yang ditetapkan yaitu sekitar 60-90% dari anggaran yang dibelanjakan. Sehingga menyebabkan alokasi dana untuk belanja modal pada tahun 2018 sampai tahun 2020 menunjukkan nilai yang terlalu rendah bahkan tidak mencapai

batas minimum proporsi yang ditetapkan yaitu antara 5-20% anggaran yang dibelanjakan pada periode tersebut. Mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pada BPS Kabupaten Tana Toraja dinilai tidak baik. Hal ini terjadi karena penggunaan anggaran pada perencanaan program prioritas lebih mengoptimalkan kedalam belanja operasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi Sartika (2018) yang menyatakan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi rata-rata sebesar 96,25% dan belanja modal rata-rata sebesar 3.74 %, yang artinya belanja operasi lebih mendominasi dibandingkan belanja modalnya.

Rasio Efektivitas Belanja

Persentase efisiensi belanja menunjukkan bahwa BPS Kabupaten Tana Toraja tahun 2018-2020 telah melakukan efisiensi anggaran belanja. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran yang ditargetkan sebelumnya dan rasio efisiensi dari tahun 2018-2020 selalu dibawah 100%. Akan tetapi jika dilihat dari hasil analisis per fungsi program terdapat realisasi anggaran di tahun 2018 lebih dari 100% yaitu terdapat pada program Laporan Neraca Produksi dimana rasio efisiensi sebesar 125,39% dan pada program Analisis dan pengembangan statistic dimana rasio efisiensinya sebesar 265,11%. Hal ini diakibatkan karena kegiatan pada program tersebut mendesak untuk dilakukan, tidak ditopang dengan kebutuhan anggaran yang ada. Artinya bahwa BPS dalam hal penyusunan anggaran tidak direncanakan dengan baik karena anggaran yang direalisasikan dari beberapa program kegiatan tidak terealisasi sesuai dengan yang direncanakan yang berarti ada beberapa program kegiatan yang tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Namun secara umum dapat dinyatakan bahwa BPS Kabupaten Tana Toraja telah melakukan efisiensi anggaran, karena realisasi belanja secara umum tidak melebihi anggaran yang ditargetkan sebelumnya.

Hasil ini mendukung pendapat Mahmudi (2016:164) jika rasio efisiensinya kurang dari 100% maka dinilai telah melakukan efisiensi anggaran. Dan jika lebih dari 100% maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran belanja.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Belanja pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja dilihat dari Varians Belanja selama tahun 2018-2020 telah melakukan penghematan anggaran dengan baik dan telah. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2018-2020 realisasi selalu lebih kecil dari anggaran yang ditargetkan sebelumnya yang berarti ketercapaian/target yang sudah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Renstra (Rencana Stretegis) sudah tercapai, karena mengingat system penggunaan anggaran pada Badan Pusat Statistik berbasis kinerja yang digunakan sesuai dengan kebutuhan atau kinerja dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tana Toraja.
2. Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tana Toraja jika dilihat dari Analisis Pertumbuhan Belanja selama tahun 2018-2020 secara umum menunjukkan pertumbuhan positif. Artinya BPS Kabupaten Tana Toraja mengalami pertumbuhan belanja dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,39%. Hal ini dinyatakan wajar karena adanya pertumbuhan realisasi belanja pada belanja pegawai dan belanja barang, dimana pertumbuhan belanja dipengaruhi oleh kenaikan inflasi pada tahun tersebut, kenaikan pangkat dari pegawai BPS dan adanya penambahan mutase pegawai yang menyebabkan kenaikan belanja pada program prioritas.
3. Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tana Toraja jika dilihat dari Analisis Keserasian Belanja dapat dinyatakan tidak seimbang

dalam penggunaan proporsi anggarannya. Hal ini dapat terlihat bahwa sebagian besar dana belanja dialokasikan untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal. Hal ini dikarenakan karena system perencanaan penyusunan anggaran di BPS dilakukan secara *Top Down Planning* dimana penyusunan anggaran dilakukan oleh BPS RI tidak berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang terjadi disetiap daerah yang mengakibatkan tidak adanya belanja modal yang dialokasikan oleh BPS Kabupaten dalam perencanaan anggaran setiap tahunnya, sehingga pengalokasian anggarannya lebih banyak dialokasikan ke belanja pegawai dan belanja barang dibandingkan pemenuhan kebutuhan belanja modal.

4. Kinerja Anggaran Belanja Badan Pusat Statistik (BPS) jika dilihat dari Rasio Efisiensi tergolong efisien karena realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang sudah ditargetkan sebelumnya. Tapi pada Tahun 2018 ada dua program kegiatan yang tidak dilakukan secara efisien. Namun secara keseluruhan BPS Kabupaten Tana Toraja telah melakukan efisiensi belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- Edison, Emron. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Alfabeta Halim, Abdul. (2016). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- _____ dan Kusufi. (2016). Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta : Salemba Empat
- Mahmudi (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi ke-3. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mahsun, Mohamad. (2012). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE Mangkunegara, Anwar Prabu. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Manguma, V., Randa, F., & Palalangan, C. A. (2019). Mengungkap Praktik Akuntabilitas Dalam Organisasi Gereja Toraja Jemaat Tallunglipu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 165-173.
- Palalangan, C. A. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Mamasa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 121-138.
- Palalangan, C. A., Paranoan, N., & Pasanda, E. (2019). Tata Kelola Keuangan pada Objek Wisata Ke'te Kesu di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(2), 59-72.
- Paranoan, N. (2015). Riset Non Positivistik Akuntansi Dalam Tiga Paradigma: Interpretif, Kritis dan Posmodernisme. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 10(1), 8-18.
- Rahayu, Sri dan Rachman, Andry Arifian. (2013). Penyusunan Anggaran Perusahaan. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Randa, F. (2011). Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi Keagamaan (Studi Etnografi pada Sebuah Gereja Katolik di Tanah Toraja). *Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi*, 9(2), 59-83.
- Rasdianto, Erlina (2013). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Medan : Brama Ardian
- Ratmono, Dwi. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. UPP STIM YKPN.
- Sambara, K., & Belolan, B. (2019). LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI GEREJA: ANALISIS PENERAPAN PSAK No. 45 (Studi Kasus Pada Gereja Toraja Eben Haeizer Di Palopo). *Jurnal Mirai Management*, 4(2), 354-365.
- Sasongko dan Parulian. (2015). Anggaran. Jakarta : Salemba Empat